

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Beranjak dari pendapat Muchsin “Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14. Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28784/Chapter%20I.pdf;jsessionid=D29A8E6D195A00B9E33B91847FC9D7E6?sequence=4>. Di akses tanggal 31 Januari 2018

¹⁵ Ibid

2. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.¹⁶

Kartini-Kartono, dalam bukunya yang berjudul *Gangguan-Gangguan Psikis* juga menjelaskan mengenai definisi Anak "Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya".¹⁷

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikatakan anak adalah makhluk berakal budi yang masih akan berkembang menjadi manusia yang utuh dalam rangka menuju manusia yang utuh tersebut karena masih muda usia dan jiwanya maka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Dalam rangka perkembangan menuju kedewasaan anak akan melalui periode-periode kritis, dan jika periode-periode kritis ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang dilingkungannya.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>. diakses 31 Januari 2018

¹⁷ Kartini-Kartono. 1981. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung. Sinar Baru. hal.187.

¹⁸ B. Simandjuntak. 1979. *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Bandung. Alumni. hal 225.

Perkembangan anak merupakan perkembangan yang bersifat menyeluruh, menurut B. Simandjuntak, perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya.¹⁹ Untuk itu memahami anak berarti pula memahami perkembangan anak itu sendiri dan mengatasi problematik anak sangatlah wajar apabila segala bentuk yang dilakukan semata-mata dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri.

a. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia.

Anak dalam kajian hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau dalam keadaan di bawah umur, belum *kuat* atau orang yang belum cakap bertindak sehingga kerap kali disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dapat ditelusuri adanya batasan umur terhadap anak. Dalam kenyataanya hal tersebut tidak terjadi. Masih banyak disharmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Beberapa undang-undang bisa disebutkan:²⁰

- a) Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

¹⁹Ibid

²⁰ Hadi Supenu. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta. PTGamedia Pustaka Utama. Hal 40

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih dalam kandungan”

- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin.
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 Tahun.
- g) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 Tahun.
- h) Dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3. Pengertian perlindungan Anak

Pasal 2, ayat (3) dan ayat (4), Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas *pemeliharaan* dan *perlindungan*, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-*perlindungan-perlindungan* terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Dalam Kedua ayat tersebut dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²¹

Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :²²

a. Pengayoman:

- 1) Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. kepentingan dan hak-asasnya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan

²¹ Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta Barat. PT Bhuana Ilmu Populer. Hal. 18.

²² Ibid Hal 4

diusahakan dikembangkan sehingga dapat mencapai peryumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal.

- 2) Yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya/panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

b. Usaha bersama:

- 1) Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak –pihak yang dilindungi tersebut.
- 2) Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antar pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar mencapai hasil yang baik (ini mungkin memakan waktu).

Perlindungan ini adalah hasil suatu interaksi karena adanya interelasi.

- 3) Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan, bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak / remaja ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan / organisasi swasta maupun pemerintah, dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain.

c. Kepentingan bersama:

Melindungi yang dilindungi berarti juga melindungi diri sendiri yang melindungi dikemudian hari dalam arti luas. Dengan melindungi seorang anak / remaja tadi dan juga dihindarkan kesulitan yang mungkin akan

menimpa / mengancam yang melindungi (orangtua, pemerintah) bila anak / remaja tadi dilindungi / tidak dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana besar secara tepat bukanlah sesuatu yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dibidang pertahanan sosial juga demi ketertiban dan keamanan masyarakat.

d. Luas lingkup perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

e. Unsur-unsur yang edukatif:

- 1) Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun. Dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan. Dapat mengemban *sense of achievement*-nya sehingga bermanfaat dalam pembangunan semesta Nasional.
- 2) Pemberian perlindungan tidak boleh mengikat para peserta dalam pemberian perlindungan.
- 3) Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri, rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi.

f. Penimbunan korban dalam pemberian perlindungan:

- 1) Yang dilindungi menjadi korban tindakan dan perlindungan yang melindungi.

- 2) Mencari keuntungan pribadi / golongan dalam kegiatan perlindungan harus dihindarkan.

g. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

4. Hak-Hak Anak

a. Pengertian hak

Pengertian kosa kata hak telah menjadi perdebatan yang cukup panjang dari dulu hingga saat ini. Mengingat demikian kompleksnya pengertian hak, maka masalah definisi hak hingga saat ini belum ditemui secara lengkap dan memuaskan. Hadjon memberikan inti yang terkandung didalam hak, yaitu

adanya suatu tuntutan atau *claim* dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum.²³

Suatu hak adalah mempunyai sifat hukum oleh karenanya hak tersebut dilindungi oleh suatu sistem hukum, disini sifat hak itu adalah untuk perlindungan. Si pemegang melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu; disini hak mempunyai sifat merupakan kehendak, dan kehendak itu diarahkan terhadap pemuasan kepentingan yang tertentu; disini hak mempunyai sifat merupakan kepentingan.²⁴

Hal senada juga dikemukakan Sudikno Mertokusumo tentang hak, ia menulis, Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedankan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.²⁵

b. Hak Anak

Dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan dalam pasal 1 angka 12 “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

²³ Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Prinsip-Prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 39.

²⁴ Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)*. Medan. UISU Pres. Hal 58

²⁵ Ibid

Dan juga didalam pasal 6 disebutkan bahwa “ setiap anak berhak menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pada pasal 9 ayat (1), ayat (1a) disebutkan bahwa :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.

Pada pasal 15 “ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.”

c. Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (Lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan

mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi konvensi hak anak.²⁶

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:²⁷

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan

²⁶ Muhammad joni dan zulchaina z. Tanamas. 1999. *Aspek hukum perlindungan anak*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakri

²⁷ Ibid

pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

B. Tinjauan Umum Tentang Budaya Kerapan Sapi

1. Pengertian Joki kerapan sapi

“Pengertian Joki (dari bahasa Inggris: jockey) ialah seseorang yang memacu kudanya dalam suatu pertandingan pacuan kuda, biasanya sebagai profesi”.²⁸

Tetapi kalau kita melihat faktanya di Indonesia, pengertian joki tidak hanya berlaku pada ajang pertandingan pacuan kuda saja, tetapi banyak pengertian joki dalam hal yang lainnya. Salah satu contohnya joki dalam kerapan sapi.

Joki kerapan sapi dalam hal ini dimana sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu (tempat ini biasanya digunakan oleh joki untuk berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut) dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi yang lain.²⁹

2. Budaya kerapan sapi

Dalam sejarahnya, budaya ini muncul setelah mengalami suatu proses adaptasi dengan lingkungan yang tandus, pertanian yang gersang, dan pola bercocok tanam yang masih primitif.³⁰

Kerapan sapi adalah ajang lomba balapan sapi yang diadakan di lapangan terbuka untuk memeriahkan keberhasilan panen di Pulau Madura. Namun dalam

²⁸ Bakaruddin Is. 2015. “Joki diberbagai kehidupan”. https://www.kompasiana.com/bakaruddin_is/joki-di-berbagai-bidang-kehidupan_5500650aa333114a73510b09. Diakses tanggal 31 Januari 2018

²⁹ Dikutip dari <http://www.lontarmadura.com/sejarah-karapan-sapi/>. Diakses tanggal 31 Januari 2018

³⁰ Kuntowijoyo. 2000. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850–1940*. Yogyakarta. Mata Bangsa Press. Hal 54.

perkembangannya, Kerapan Sapi tidak sekadar menjadi ajang adu cepat lari pasangan sapi, tetapi sudah menjadi adu gengsi, prestise dan harga diri bagi pemilik sapi kerapan. Kerapan Sapi merupakan acara khas masyarakat Madura yang di gelar pada bulan Agustus atau September, dan akan di lombakan lagi pada final di akhir bulan September atau Oktober setiap tahunnya.³¹

3. Jenis Kerapan Sapi

Saat ini, secara garis besar, ada dua macam kerapan sapi, yaitu kerapan sapi formal dan kerapan sapi nonformal. Kerapan sapi formal ditangani oleh sebuah panitia penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang dalam hal ini adalah Dinas Kehewan dan Peternakan, dan pemenangnya diberi hadiah dari sponsor atau dari panitia penyelenggara. Adapun kerapan sapi non-formal tidak ditangani oleh panitia, tetapi hanya mendapatkan pengawasan dari pemerintah terkait dengan masalah keamanan dan ketertibannya.³²

4. Fungsi Budaya Kerapan Sapi

Kerapan Sapi sebagai budaya asli Madura merupakan hasil dari pandangan, aturan, kepercayaan, dan sikap yang mendorong masyarakat Madura melakukan kegiatan yang sangat unik melalui Budaya Kerapan Sapi. Budaya Kerapan Sapi memiliki beberapa fungsi, antara lain:³³

³¹ Herry Lisbijanto. 2013. *Kerapan Sapi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

³² Imam Bonjol Juhari. 2016. *Ekonomi dan Prestise dalam Budaya Kerapan Sapi di Madura*. KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2016: 186-204 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.913. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Hal 193

³³ Kurnia Fahmi Astutik dan Sarmini. 2014. *Budaya Kerapan Sapi Sebagai Modal Sosial Masyarakat Madura Di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*. Surabaya. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3. PPKn. FIS. Universita Negeri Suarabaya.

a. Fungsi sosial

Perlombaan Budaya Kerapan Sapi pada masyarakat Madura yang daerahnya beriklim tropis sangat ditunggu-tunggu karena dengan adanya Budaya Kerapan Sapi, maka masyarakat Madura akan saling berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor penting salah satunya adalah faktor sugesti.

b. Fungsi budaya

Fungsi budaya dari Budaya Kerapan Sapi tidak lain adalah sebagai kebudayaan orisinil masyarakat Madura. Kerapan Sapi merupakan suatu peristiwa budaya yang menunjukkan identitas daerah Madura sebagai budaya asli yang perlu dilestarikan dan dicermati dari aspek waktu baik pada saat persiapan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat Madura sebagai pemilik sapi kerapan, penonton, dan joki kerapan sapi. Budaya Kerapan Sapi dikatakan sebagai sebuah kebudayaan, karena lahir dari adanya faktor sugesti yang mengakar dan kemudian disepakati oleh masyarakat Madura serta dapat melahirkan kearifan dalam masyarakat Madura dan membentuk pola pikir perilaku masyarakat Madura.

c. Fungsi hiburan

Fungsi hiburan dari Budaya Kerapan Sapi adalah sebagai sarana hiburan, menghilangkan stress, dan bersantai yang menjadikan penonton menjadi lebih bersemangat dan optimis kembali untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Salah seorang penonton Kerapan Sapi berpendapat,

terutama yang menyenangkan adu kecepatan sapi kerapen bahwa ketika melihat sapi kerapen berlari kencang, maka dia merasa semangat untuk terus menyaksikan perlombaan tersebut hingga selesai. Jika, tidak akan merasa kepikiran tentang siapa yang akan menjadi juara dalam kerapen sapi.

d. Fungsi politik

Fungsi politik dari Budaya Kerapen Sapi adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan massa atau pengikut. Proses dalam mengumpulkan massa atau pengikut tersebut terjadi melalui hubungan yang bersifat horizontal antar sesama masyarakat Madura. sehingga seringkali Budaya Kerapen Sapi dijadikan sebagai ajang untuk berkampanye partai politik tertentu.

